



**TIGA TAHUN DIREKTORAT  
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

**2015 - 2017**



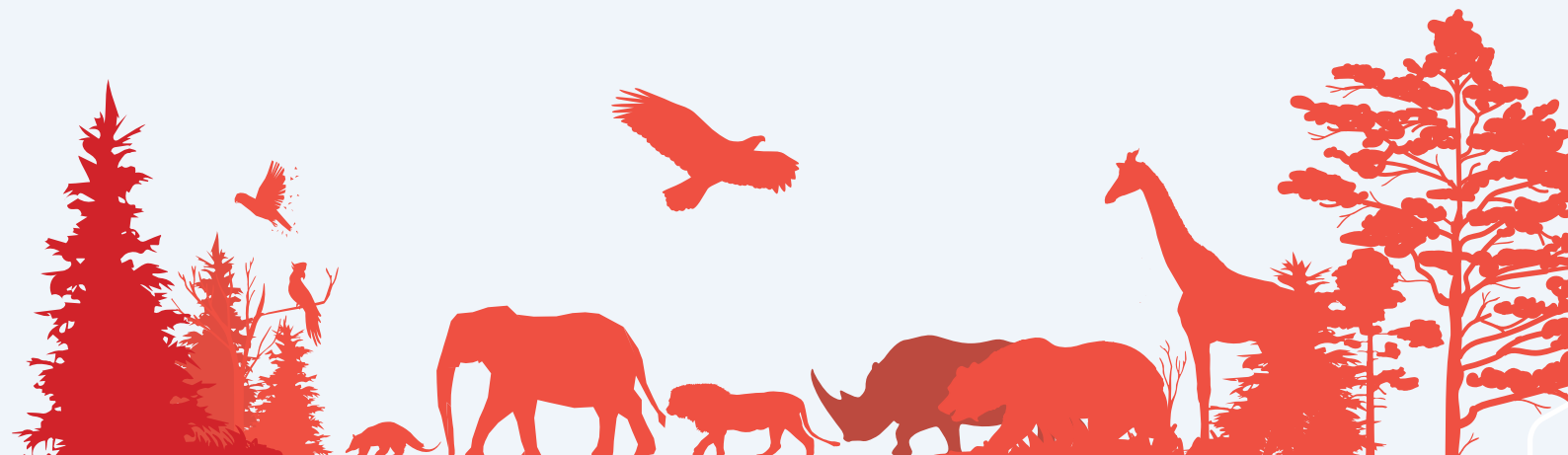


# **TIGA TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

# **2015 - 2017**

Disusun oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**







## TATA KELOLA, TANTANGAN DAN PELUANG GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**K**ehadiran Gakkum LHK diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menjamin ketersediaan sumber daya produksi untuk menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan.

# TUJUAN STRATEGIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM



# TANTANGAN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEJAHATAN LUAR BIASA





## PELUANG GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



### PERATURAN OPERASIONAL

UU No. 5/1990 tentang  
Konservasi Sumber  
Daya Alam Hayati dan  
Ekosistemnya

UU No. 41/1999 tentang  
Kehutanan

UU No. 32/2009 tentang  
Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

UU No. 18/2013  
tentang Pencegahan  
dan Pemberantasan  
Perusakan Hutan

UU No. 37/2014 tentang  
Konservasi Tanah dan Air

UU No. 18/2008 tentang  
Pengelolaan Sampah

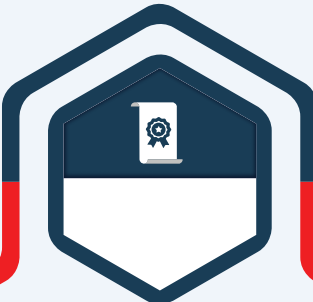
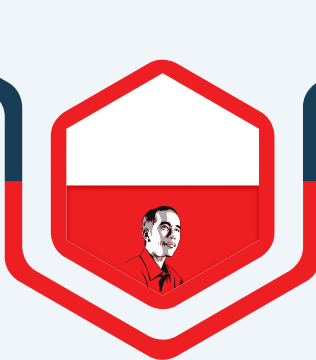
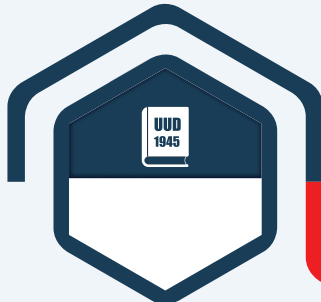
UU No. 8/2010 tentang  
Tindak Pidana Pencucian  
Uang

### NAWACITA

Memperkuat Kehadiran  
Negara dalam melakukan  
Reformasi Sistem dan  
Penegakan Hukum  
yang bebas Korupsi,  
Bermartabat dan  
Terpercaya

### KONSTITUSI HIJAU

Pasal 28 H Ayat 1  
Pasal 33 Ayat 4



### KOMITMEN POLITIK NASIONAL

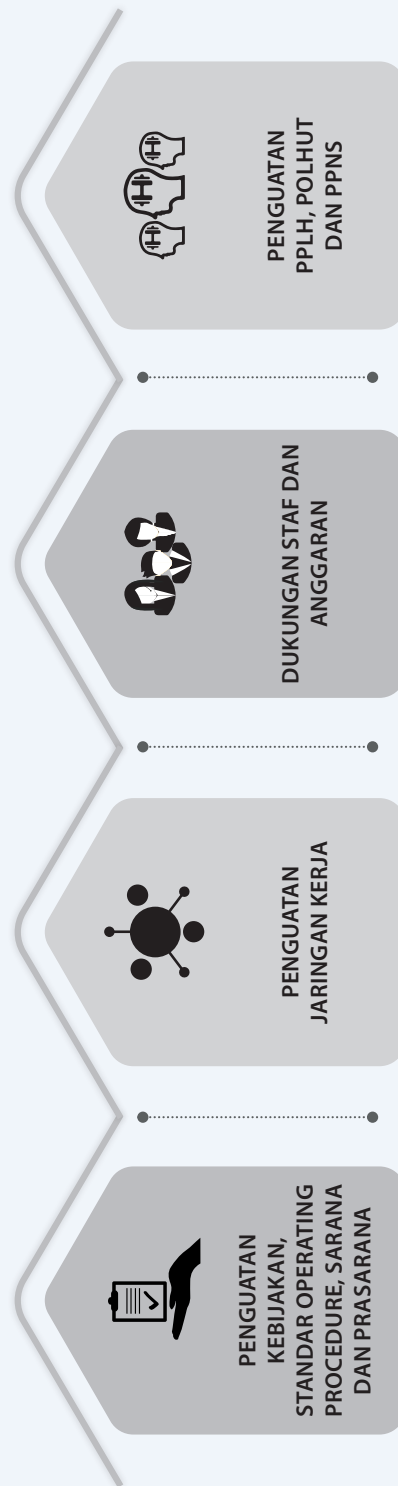
"Tindak Tegas para  
pelaku illegal logging,  
illegal mining, dan  
illegal fishing!"

(Presiden Joko Widodo,  
Hari Lingkungan Hidup, 5  
Juni 2015)

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Politik Hukum,  
Pertahanan dan  
Keamanan: Kepastian  
Hukum: Penegakan  
Hukum yang Berkualitas

# PROSES BISNIS GAKKUM KLHK





## ORGANISASI GAKKUM LHK



**Direktur Jenderal  
Gakkum LHK**  
Rasio Ridho Sani,  
M.Com, MPM



**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Gakkum KLHK**  
Ir. Kemal Amas, M.Sc



**Direktur Pengaduan, Pengawasan,  
dan Sanksi Administrasi**  
Rosa Vivien Ratnawati SH, MSD



**Direktur Pencegahan dan  
Pengamanan Hutan**  
Drh. Indra Exploitasia



**Direktur Penyelesaian Sengketa  
Lingkungan Hidup**  
Jasmin Ragil Utomo SH, MM



**Direktur Penegakan Hukum  
Pidana**  
Drs. Muhammad Yunus, MSi



**BPPHLHK  
SUMATERA**



**BPPHLHK JAWA  
BALI NUSA  
TENGGARA**



**BPPHLHK  
KALIMANTAN**



**BPPHLHK  
SULAWESI**



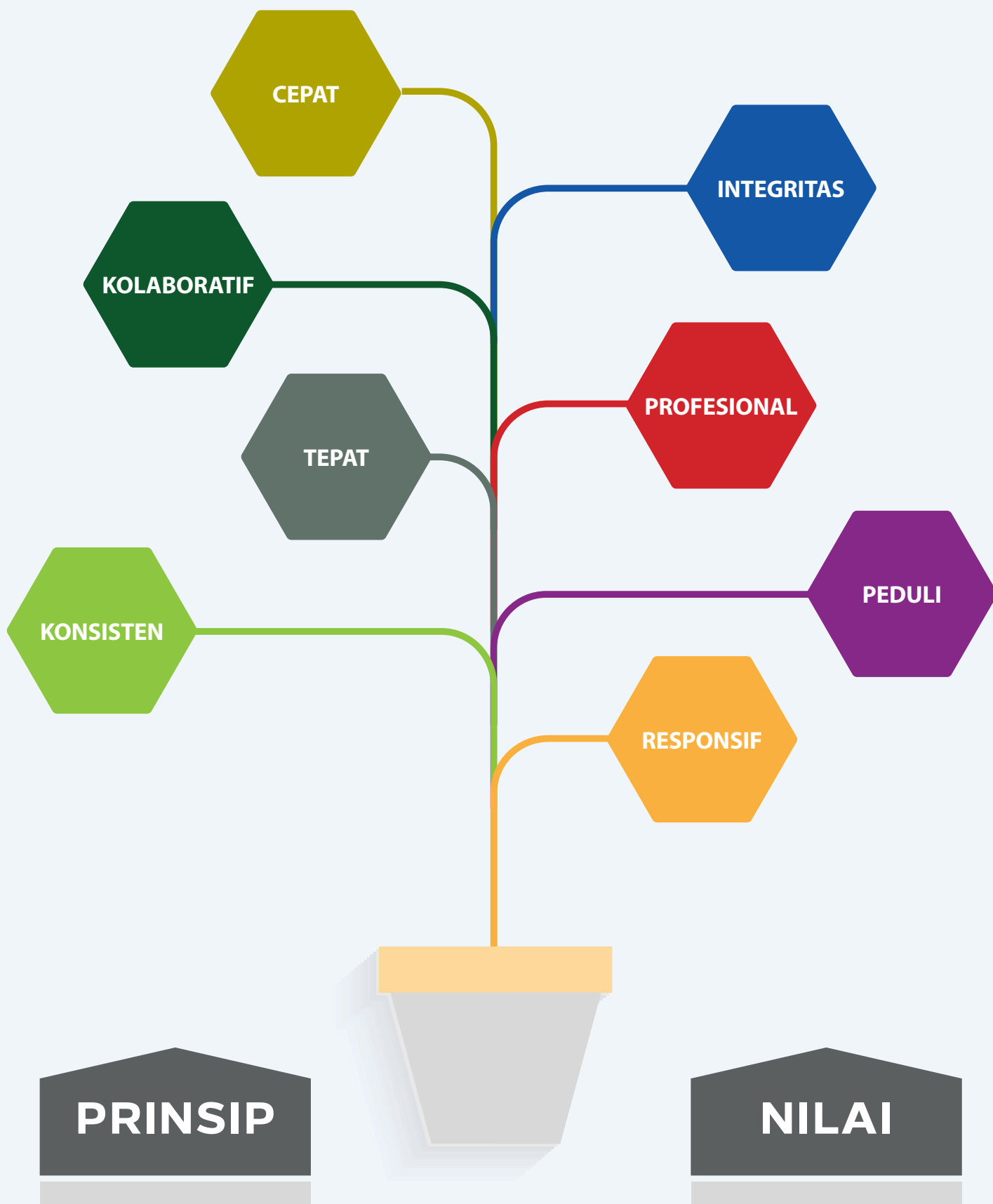
**BALAI  
MALUKU  
PAPUA**

### **BPPHLHK :**

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan



## PRINSIP-PRINSIP KERJA DAN NILAI-NILAI INTI GAKKUM LHK

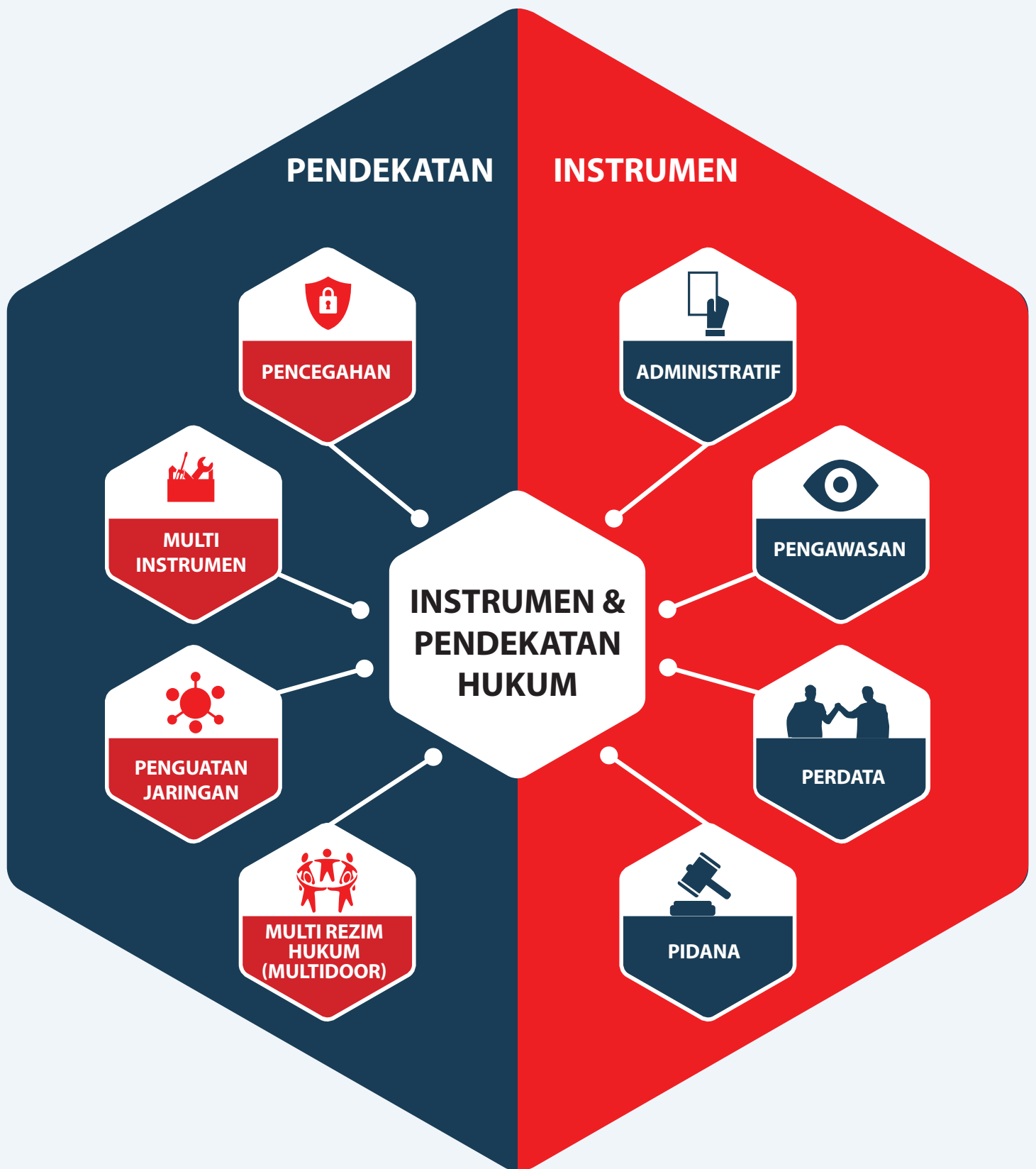




## INSTRUMEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

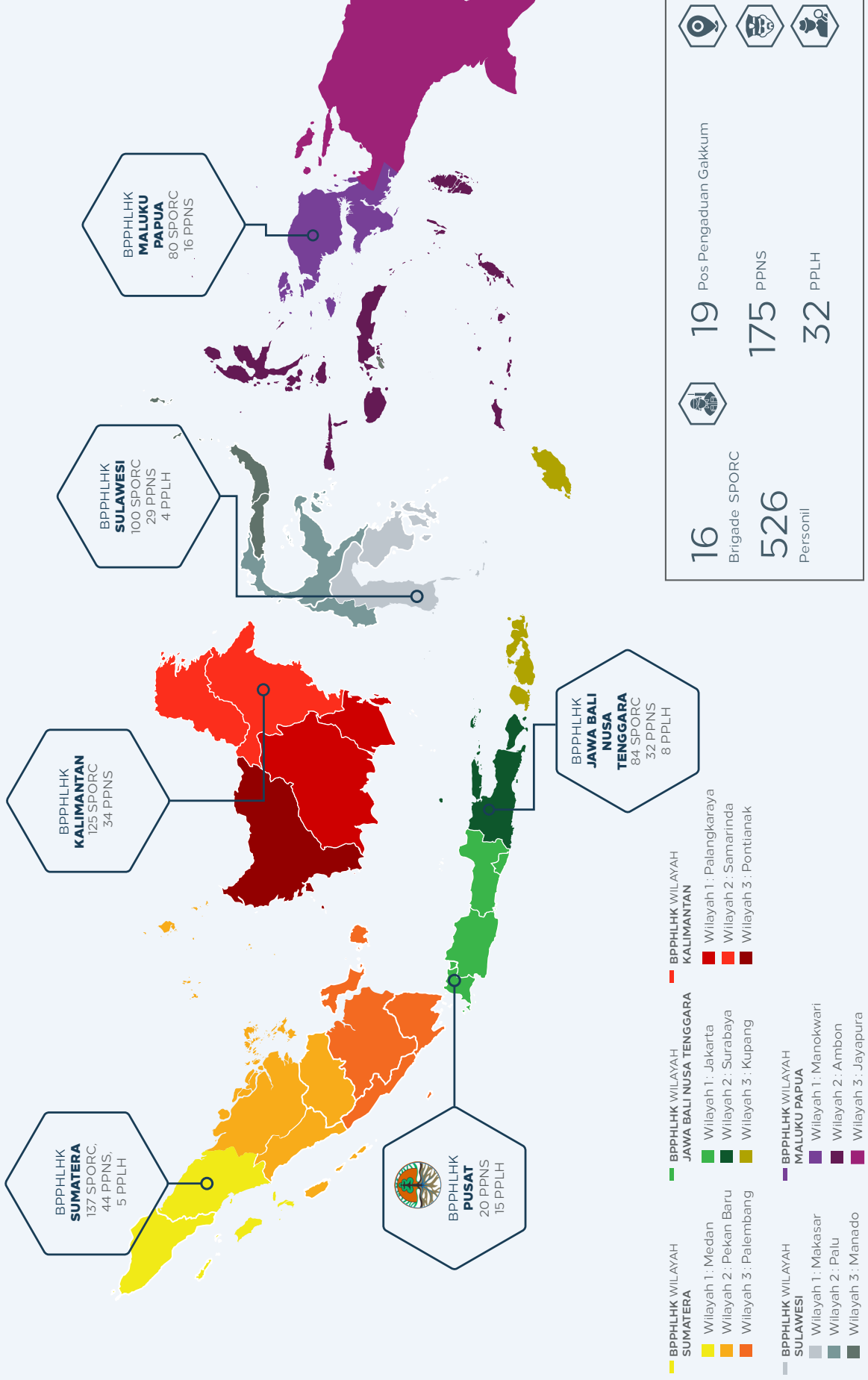
**G**akkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberdayakan sumber daya manusia, mengembangkan jaringan yang kuat dan menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi untuk penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan secara utuh.

# INSTRUMEN DAN PENDEKATAN GAKKUM LHK





# KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN APARAT GAKKUM



## GAKKUM DALAM GAMBAR



1



2



3



6



5



8



4



7



10



12



9



11

- 1 Operasi TSL di Jakarta.
- 2 Pengawasan Izin Lingkungan dalam Kerangka Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 3 Kunjungan lapangan bersama TIM Kejaksaa kasus dumping limbah B3 ( FLY ASH, BOTTOM ASH ) di Tenggarong, Kalimantan Timur.
- 4 Operasi Pengamanan Hutan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu.
- 5 Operasi Pengamanan Hutan di Ekosistem Tesso Nilo.
- 6 Pengambilan sampel limbah b3 oleh ppns berupa spent bleaching earth, di tempat pembuangan akhir di Batam.
- 7 Persidangan Perdata untuk kebakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 8 Pembalakan liar, sumber kayu dari Sumatera tertangkap di Sawmill di Serang.
- 9 Petugas Gakkum Sulawesi Sita 64 Ekor Cenderawasih yang Diawetkan dan 84 ikat bulu kasuari.
- 10 Penyegehan penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan di reklamasi pantura Jakarta.
- 11 Penyegehan untuk proses pidana kebakaran hutan di Riau.
- 12 Pelatihan satuan polisi hutan reaksi cepat gakkum LHK.

## INOVASI-INOVASI GAKKUM 2015-2017



### PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LAPIS KEDUA

Penerapan Sanksi  
Administrasi Terkait  
Reklamasi

Penerapan Sanksi  
Administrasi Terkait  
Kebakaran Hutan



### CENTER OF INTELLIGENCE



### PENERAPAN STRICT LIABILITY

Kasus Kebakaran Hutan PT  
Waimusi Agroindah



### PENERAPAN HUKUM MULTIDOOR

Program Hakim Bersertifikat  
622 Orang

Penyidik (PPNS & Polisi) &  
Jaksa

Penerapan Registrasi  
Perkara Oleh MA

Penambahan Kewenangan  
PPNS LHK Sesuai UU TPPU



### KEBIJAKAN SIMBOLIK PENEGAKAN HUKUM







## CAPAIAN 2015-2017

**G**akum LHK memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum melalui penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan pencegahan dan pengamanan kawasan, serta penerapan instrumen penegakan hukum yaitu sanksi administrasi, pidana dan perdata.

## CAPAIAN 2015 - 2017

**Rp 35,4** Milyar untuk Nilai Pengganti Kerugian dan Pemulihan di Luar Pengadilan

**352** P21 Penegakan Hukum Pidana



**Rp 16,6** Trilyun untuk Total Putusan Pengadilan *Incracht* untuk Pengantian Kerugian dan Pemulihan (Perdata)

**127** Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

**71** Operasi Perambahan Hutan



**91** Operasi Pembalakan Liar/Hasil Hutan

**1.503** Pengaduan Selesai Ditangani

**194** Pengaduan dalam Proses Penanganan



**371** Pengawasan Langsung

**112** Pengawasan Tidak Langsung

**369** Penerapan Sanksi Administrasi

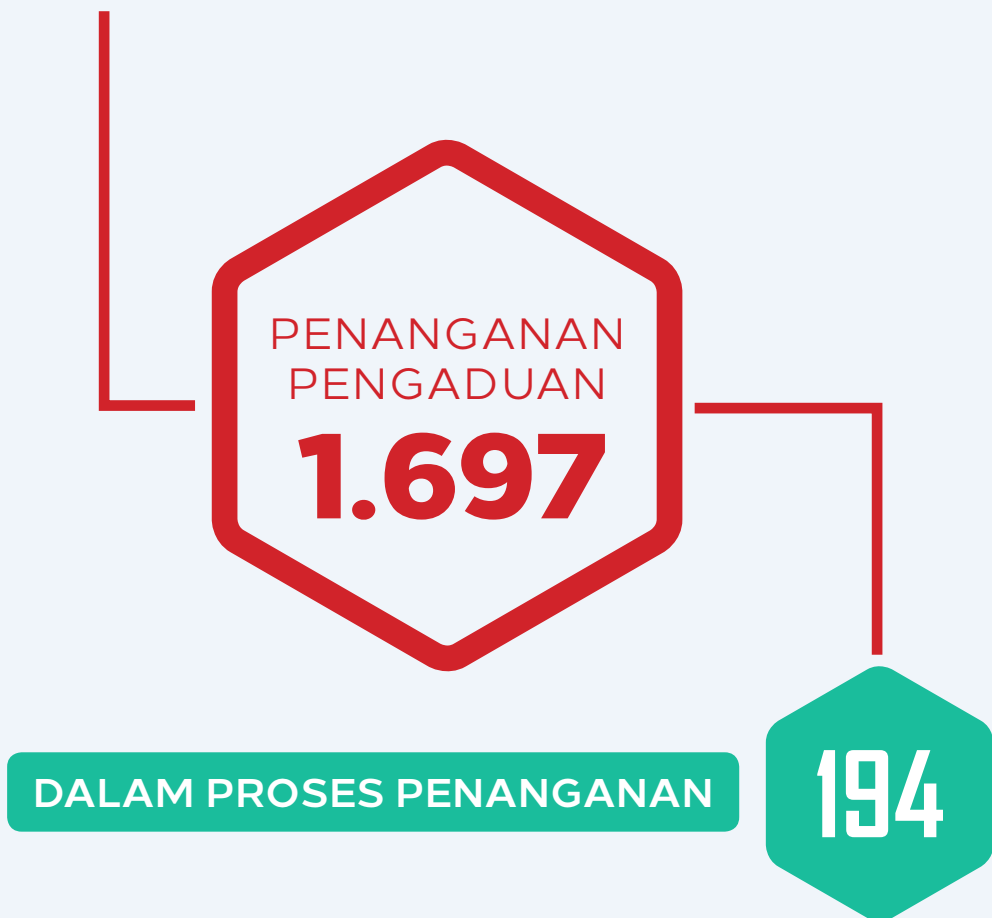
**16** Brigade SPORC  
**526** Personil

**33** PPLH



**175** PPNS

**2759** Polhut



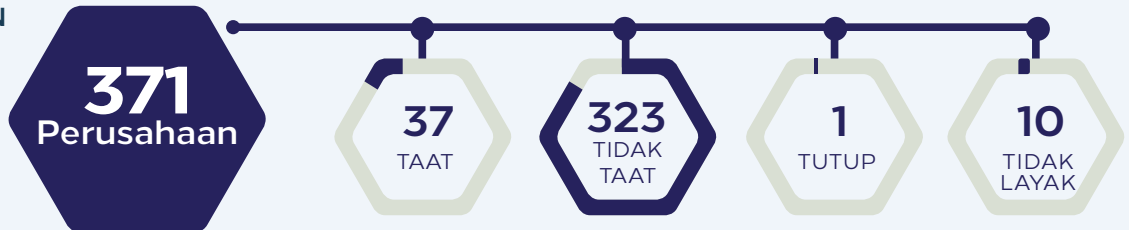




## PENGAWASAN PERIZINAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

### ■ PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP

✓ (1447 Izin)



### ■ PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG TERHADAP

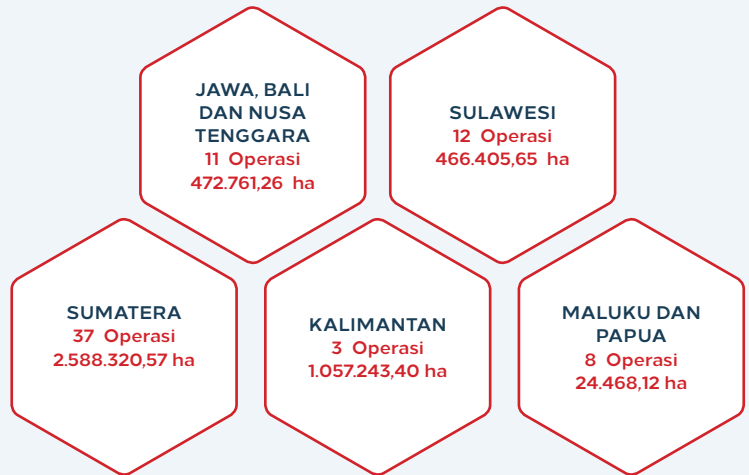
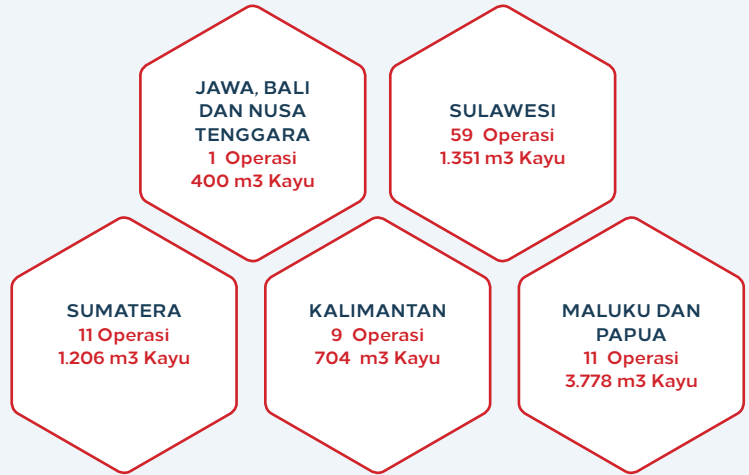
✓ (196 Izin)



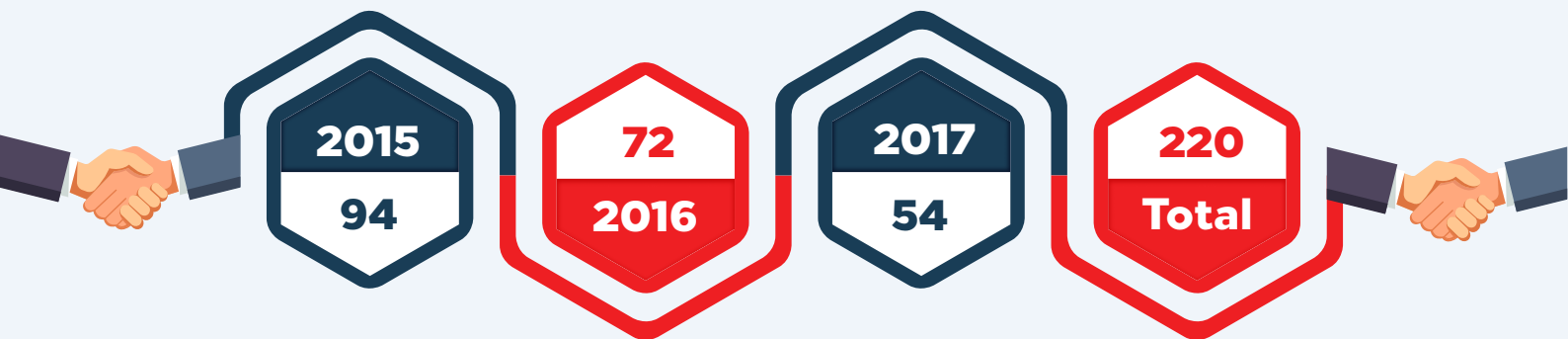
PENERAPAN  
SANKSI  
ADMINISTRASI  
**369**



## OPERASI PENGAMANAN KAWASAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN



## PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN 2015 - 2017



## PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN 2015 - 2017

TAHAPAN	TERGUGAT	KASUS	BESARAN GUGATAN	BESARAN PUTUSAN	KETERANGAN
<b>PENINJAUAN KEMBALI/EKSEKUSI</b>	PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa	Perusakan Lingkungan Hidup	32.2 Milyar	32.2 Milyar	- Putusan Pengadilan ( <i>Incracht Van Gewijsde</i> ), biaya pemulihan LH. - Telah sepakat untuk membayar biaya pemulihan LH.
	PT. Kallista Alam	Kebakaran Hutan dan Lahan	366 Milyar	366.06 Milyar	Putusan Pengadilan ( <i>Incracht Van Gewijsde</i> ), Kerugian LH dan Biaya Pemulihan LH
	PT. Merbau Pelalawan Lestari	Penebangan Kayu Alam	16.2 Trilyun	16.2 Trilyun	Putusan Pengadilan ( <i>Incracht Van Gewijsde</i> ), Kerugian LH
	PT. Surya Panen Subur	Kebakaran Hutan dan Lahan	439 Milyar	-	Menunggu Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung
<b>KASASI</b>	PT. Jatim Jaya Perkasa	Kebakaran Hutan dan Lahan	491.02 Milyar	29.4 Milyar	Menunggu Putusan Kasasi MA
<b>BANDING</b>	PT. Bumi Mekar Hijau	Kebakaran Hutan dan Lahan	7.9 Trilyun	78.5 Milyar	Pelacakan Relas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang
	PT. Nasional Sago Prima	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.07 Trilyun	1.07 Trilyun	Menunggu Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
	PT. Waringin Agro Jaya	Kebakaran Hutan dan Lahan	758.4 Milyar	466.4 Milyar	Menunggu Putusan Panding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
	PT. Ricky Kurniawan Kertapersada	Kebakaran Hutan dan Lahan	191.8 Milyar	-	Menunggu Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jambi
	PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi	Kebakaran Hutan dan Lahan	539.5 Milyar	-	Menunggu Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
<b>PUTUSAN PN</b>	PT Waimusi Agroindah	Kebakaran Hutan dan Lahan	209.2 Milyar	29.6 Milyar	Menunggu Relas dari PN Palembang
<b>PERSIDANGAN DI PN</b>	PT. Palma Utama	Kebakaran Hutan dan Lahan	183.7 Milyar	-	Memasuki agenda sidang pemeriksaan keterangan ahli tergugat
	PT TEP Montara	Perusakan Lingkungan Hidup	27 Trilyun	-	Memasuki agenda sidang ke-II di PN Jakarta Pusat (pemeriksaan kelengkapan administrasi tergugat).
<b>PROSES PENYUSUNAN GUGATAN</b>	MV Caledoinan Sky	Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	Proses Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Agung RI

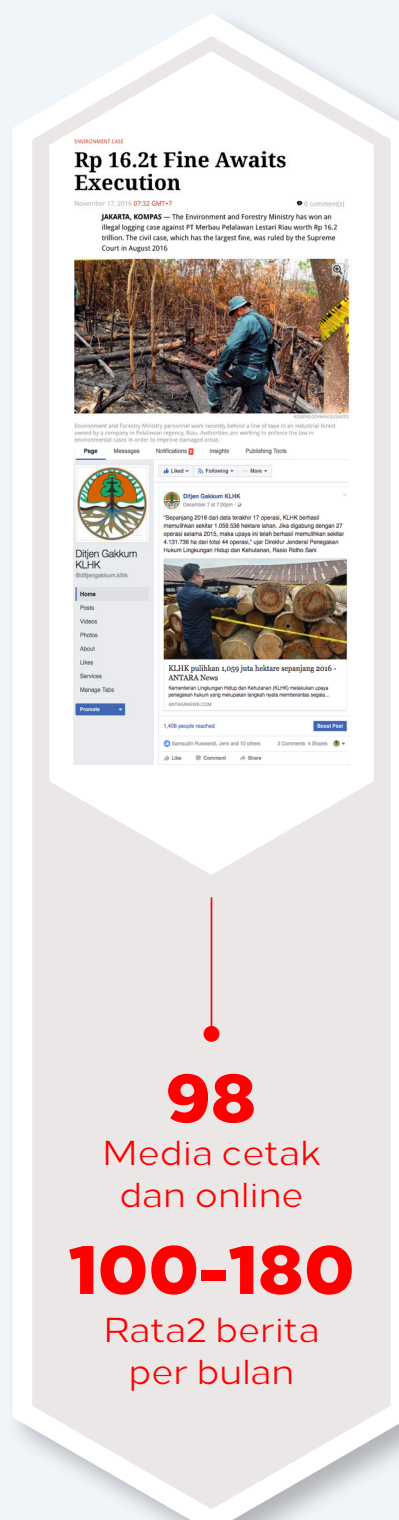




# Penegakan Hukum Pidana Tahun 2015 - 2017



## KAPASITAS PUBLIK

MEDIA  
SOSIALMEDIA  
MASSA

## ALAMAT KANTOR BALAI DAN SEKSI BPPHLHK

No	BPPHLHK	BALAI/SEKSI	ALAMAT	KSB TU
1	SUMATERA	KANTOR BALAI	Jl. Ringroad, Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang - Medan balai.pphlhk.sumatera@gmail.com	Azwar, SS., M.Si azwarrahman436@gmail.com
		Seksi I Medan (Aceh, Sumut)	Jl. Karya Marindal Dalam Patumbak - Deli Serdang, Sumatera Utara	
		Seksi II Pekanbaru (Riau, Kepri, Jambi, Sumbar)	Jl. HR Soebrantas KM. 8,5 Pekanbaru - Riau	
		Seksi III Palembang (Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung)	Jl. Srijaya KM. 5,5 RT 21/ RW 7 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 301530	
2	JAWA BALI NUSRA	KANTOR BALAI	Jl. Bandara Juanda No. 100 PO Box 61 Surabaya - Jawa Timur. Kode Pos 61235. Telp. (031) 8662173 Fax (031) 8673687	H. Murdiyono, S.Hut b3ni_murdiyono@yahoo.co.id
		Seksi I Jakarta (Banten, DKI, Jabar)	Jl. Salemba Raya No. 9 Jakarta	
		Seksi II Surabaya (Jateng, DIY, Jatim)	Jl. Bandara Juanda No. 100 PO Box 61 Surabaya - Jawa Timur Kode Pos 61235. Telp. (031) 8662173 Fax (031) 8673687	
		Seksi III Kupang (Bali, NTB, NTT)	Jl. SK Lerik, Kelapa Lima, Kupang, NTT	
3	SULAWESI	KANTOR BALAI	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17, Makassar, Sulawesi Selatan bphlhksulawesi@yahoo.com	Kahar, SE., MAP kaharmade@gmail.com
		Seksi I Makassar (Sulsel, Sultra)	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17, Makassar, Sulawesi Selatan	
		Seksi II Palu (Sulteng, Sulbar)	Jl. Towua No.75, Kelurahan Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Palu - Sulawesi Tengah	
		Seksi III Manado (Sulut, Gorontalo)	Jl. Babe Palar, Rike, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea Kota Manado - Sulawesi Utara	
4	KALIMANTAN	KANTOR BALAI	Jl. Tengku Umar No.1 Kel. Tanjung Asam Kec. Sungai Kunjang Samarinda - Kalimantan Timur bp2hlhk.kalimantan@gmail.com	Ir. Edy Zulkarnain, M.Si edyzulkarnain@yahoo.com
		Seksi I Palangkaraya (Kalsel, Kalteng)	Jl. RTA. Milono KM 8,5 Palangkaraya-Kalimantan Tengah Telp/Fax. (0536) 3245914	
		Seksi II Samarinda (Kaltim, Kaltara)	Jl. Tengku Umar No.1 Kel. Tanjung Asam Kec. Sungai Kunjang Samarinda - Kalimantan Timur	
		Seksi III Pontianak (Kalbar)	Jl. Mayor Alianyang Trans Kalimantan No.4 Kab. Kubu Raya - Kalimantan Barat	
5	MALUKU PAPUA	KANTOR BALAI	Jl. Serma Suwandi, Komplek BLK Sanggeng, Manokwari, Papua Barat. Kode Pos 98312 bphlhk.maluku.papua@gmail.com	M. Ihya Syari'udin, S.Hut., M. SE ihya_ptkp@yahoo.com
		Seksi I Manokwari (Papbar)	Jl. Serma Suwandi, Komplek BLK Sanggeng, Manokwari, Papua Barat. Kode Pos 98312	
		Seksi II Ambon (Maluku, Maluku Utara)	Jl. DR. J. Leimena, Kelurahan Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Kode Pos 97235	
		Seksi III Jayapura (Papua)	Jl. Raya Abepura - Kotaraja, Abepura, Jayapura, Papua. Kode Pos 99225 (Kompleks UPT Kemen LHK)	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN

**Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 3**

Jln. Gatot Subroto - Senayan Jakarta  
Indonesia - 10207

+62-21-5704501-04; +62-21-5730191